

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TERKAIT DENGAN
KETENTUAN PASAL 9 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
PAJAK NOMOR: PUT-012524.16/2021/PP/M.IVA TAHUN 2024 TANGGAL 2 APRIL
2024**

TESIS

Oleh

Aonudin

(2202190086)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TERKAIT DENGAN
KETENTUAN PASAL 9 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
PAJAK NOMOR: PUT-012524.16/2021/PP/M.IVA TAHUN 2024 TANGGAL 2 APRIL
2024**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

AONUDIN

(2202190086)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AONUDIN
NIM : 2202190086
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TERKAIT DENGAN KETENTUAN PASAL 9 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR: PUT-012524.16/2021/PP/M.IVA TAHUN 2024 TANGGAL 2 APRIL 2024"**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 08 Mei 2025

Materai Rp 10

AONUDIN

NIM: 2202190086





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

"TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TERKAIT DENGAN
KETENTUAN PASAL 9 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR: PUT-
012524.16/2021/PP/M.IVA TAHUN 2024 TANGGAL 2 APRIL 2024"

Oleh:

Nama : AONUDIN
NIM : 2202190086
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang
Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program
Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

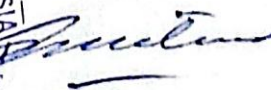
Jakarta, 08 Mei 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA Dr. Scrirama Butarbutar, S.E., M.Si., S.H., M.H
NIDN: 0326106005 NIDK: 9903002023

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltinda Saragi, S.H., M.H.
NIDN: 191691/0305097105

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. E. Bergadeta Napczak, M.Pd., PA.
NIP/NIDK: 001473/0820116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 16 Juni 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : AONUDIN

NIM : 2202190086

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TERKAIT DENGAN KETENTUAN PASAL 9 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR: PUT-012524.16/2021/PP/M.IVA TAHUN 2024 TANGGAL 2 APRIL 2024"

Oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji

Jabatan Dalam Tim Penguji

Tanda tangan

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.

Sebagai Ketua.....

2. Dr. Serirama Butarbutar, S.E., M.Si., S.H., M.H.

Sebagai Anggota.....

3. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

Sebagai Anggota.....



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : AONUDIN
NIM : 2202190086
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **"TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TERKAIT DENGAN KETENTUAN PASAL 9 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR: PUT-012524.16/2021/PP/M.IVA TAHUN 2024 TANGGAL 2 APRIL 2024"**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung

secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 14 Juli 2025



AONUDIN

NIM: 2202190086



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"Tinjauan Yuridis atas Putusan Pengadilan Pajak terkait dengan Ketentuan Pasal 9 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012524.16/2021/PP/M.IVA Tahun 2024)"** dengan baik.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap praktik penegakan hukum pajak yang dinilai masih menyisakan permasalahan dalam aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, khususnya dalam konteks hak pengkreditan Pajak Masukan oleh Wajib Pajak.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para pembimbing, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Pembimbing 1, dan Dr. Serirama Butarbutar, S.H., M.H, selaku Pembimbing 2. Serta Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Penguji, yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya tesis ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

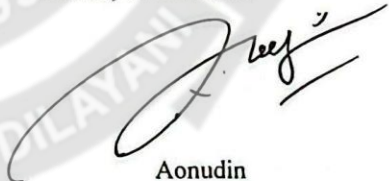
1. Ir. Eddy Rainal Sinulingga, MBA, Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
3. Prof. Dr. Dr. Bernadetha Nadeak M.Pd., PA, Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (UKI).
4. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, dan Dr. Serirama Butarbutar, S.H., M.H, selaku Pembimbing pada Ujian Penelitian Proposal, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Tesis ini.
6. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, dan Dr. Serirama Butarbutar, S.H., M.H, selaku Pembimbing pada Ujian Penelitian Sidang Tesis, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Tesis ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi dalam penulisan Tesis ini, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

Secara khusus, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga tersayang Orang tua, Istri, Putra dan Putri tercinta dan teman-teman yang telah memberikan do'a, motivasi dan dukungan serta senantiasa mendampingi dalam masa sulit dan bahagia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia akademisi serta praktisi di bidang hukum pajak dan acara perpajakan di Indonesia.

Jakarta, 17 Juni 2025



Aonudin

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Kegunaan Penelitian	17
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	17
1. Kerangka Teoritis	17
2. Kerangka Konseptual	31
E. Metode Penelitian.....	35
1. Spesifikasi Penelitian	35
2. Pendekatan Penelitian	36
3. Jenis dan Sumber Data	36
4. Teknik Pengumpulan Data	37
5. Lokasi Penelitian	37
F. Sistematika Penulisan	38
BAB II Tinjauan Pustaka Hukum Pajak Dan Acara Perpajakan	41

A. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM).....	41
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	41
2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	42
B. Upaya Hukum Sengketa Pajak Pusat	44
C. Badan Peradilan Pajak.....	44
1. Perkembangan Badan Peradilan Pajak.....	44
2. Kewenangan Pengadilan Pajak	49
3. Proses atau Prosedur Gugatan Dan Banding.....	51
D. Kualifikasi Acara Persidangan	52
1. Pemeriksaan Dalam Persidangan	52
2. Putusan	55
3. Pelaksanaan Putusan	55
4. Peninjauan Kembali	56
E. Teori Keadilan Adam Smith.....	57
1. Prinsip Equality	57
2. Prinsip Certainty	58
3. Prinsip Convenience of Payment.....	59
4. Prinsip Efficiency.....	59
F. Teori Keadilan Aristoteles	59
1. Keadilan Distributive	59
2. Keadilan Commutative	61
G. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	61
1. Justice (Keadilan).....	62
2. Expediency (Kemanfaatan)	63
3. Legal Certainty (Kepastian Hukum)	64

BAB III Penerapan Rasa Keadilan Dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan Pajak Atas Koreksi Pengkreditan Pajak Masukan Dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 012524.16/2021/PP/M.Iva Tahun 2024 66

A. Perkara Sengketa Pajak Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012524.16/2021/PP/M.IVA Tahun 2024 66

1. Para Pihak..... 66

2. Kronologi Sengketa 67

3. Pertimbangan Hukum..... 83

B. Analisis Penerapan Rasa Keadilan dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan Pajak atas Koreksi Pengkreditan Pajak Masukan dalam Putusan Nomor : PUT012524.16/2021/PP/M/IVA Tahun 2024 95

1. Analisis Penerapan Rasa Keadilan dengan Menggunakan Teori Adam Smith 98

2. Analisis Penerapan Rasa Keadilan dengan Menggunakan Teori Aristoteles 113

BAB IV ANALISIS TUJUAN HUKUM ATAS HAK MENINGKREDITKAN PAJAK MASUKAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PPN 1984 DIKAITAKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR : PUT012524.16/2021/PP/M.IVA TAHUN 2024 126

A. Analisis Tujuan Hukum berdasarkan Teori Gustav Radbruch atas Hak Pengkreditan Pajak Masukan 129

B. Upaya Hukum Luar Biasa dalam Rangka Menegakkan Keadilan atas Penolakan Pengkreditan Pajak Masukan 148

BAB V PENUTUP 153

A. Kesimpulan 153

B. Saran 155

DAFTAR PUSTAKA 156

ABSTRAK

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis atas Putusan Pengadilan Pajak terkait dengan Ketentuan Pasal 9 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012524.16/2021/PP/M.IVA Tahun 2024).

Dalam menyelesaikan perselisihan pajak, negara memegang peran penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara adil, jelas, dan memberikan manfaat bagi semua pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak pengkreditan Pajak Masukan dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang PPN dan studi kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012524.16/2021/PP/M.IVA Tahun 2024. Fokus utama terletak pada koreksi atas permohonan restitusi sebesar Rp. 22.076.200.000 yang ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap PT Harapanjaya Bumipertiwi atas dasar penggunaan pasal yang telah dicabut, yaitu Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang PPN. Penelitian ini menggunakan kajian teori keadilan Adam Smith, Aristoteles, serta teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisis karena teori keadilan Adam Smith untuk menilai kepastian, efisiensi, kenyamanan, dan kesetaraan beban pajak; teori keadilan Aristoteles untuk menelaah keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip keadilan distributif dan komutatif; serta teori tujuan hukum Gustav Radbruch untuk mengevaluasi konflik antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pajak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penolakan hak pengkreditan oleh DJP dan penguatan oleh Pengadilan Pajak bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, melanggar asas legalitas karena menggunakan pasal yang telah dicabut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakefisienan sistem perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perpajakan harus memperhatikan tidak hanya aspek formal hukum, tetapi juga keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak konstitusional wajib pajak. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya pembaruan regulasi, pendekatan substansial dalam penegakan pajak, serta interpretasi hukum yang adil dan proporsional oleh aparat penegak hukum pajak.

Kata kunci: Pajak Masukan, PPN, Keadilan Pajak, Teori Gustav Radbruch, Keadilan Adam Smith & Aristoteles.

ABSTRACT

Thesis Title: *Juridical Review of the Tax Court Decision Regarding the Provisions of Article 9 Paragraph (9) of Law Number 42 of 2009 on the Third Amendment to Law Number 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods (Case Study of Tax Court Decision Number PUT-012524.16/2021/PP/M.IVA Year 2024)*

Key Word : *Input Tax, VAT, tax justice, Gustav Radbruch theory, Adam Smith & Aristotle's justice.*

In resolving tax disputes, the state plays a crucial role in ensuring that the dispute resolution process is carried out fairly, clearly, and beneficially for all parties involved. This research aims to analyze the right to credit Input Tax under the Value Added Tax (VAT) system based on the VAT Law and the case study of Tax Court Decision Number PUT-012524.16/2021/PP/M.IVA Year 2024. The primary focus is on the correction of a restitution request amounting to IDR 22,076,200,000, which was rejected by the Directorate General of Taxes (DGT) on the basis of a repealed article, namely Article 9 paragraph (8) letter a of the VAT Law. This study employs the justice theories of Adam Smith and Aristotle, as well as Gustav Radbruch's theory of legal purpose, as analytical tools. Adam Smith's theory assesses certainty, efficiency, convenience, and tax burden equity; Aristotle's justice theory examines the balance of rights and obligations through the principles of distributive and commutative justice; and Radbruch's legal purpose theory evaluates the conflicts between legal certainty, justice, and utility in the enforcement of tax law.

The research uses a normative legal research method to gather the necessary data related to the issues under study. The data comprises secondary materials, including primary, secondary, and tertiary legal sources. Primary data is also used to support the secondary legal materials. Data analysis is conducted through qualitative juridical analysis.

The results of the research indicate that the rejection of input tax credit rights by the DGT, and its affirmation by the Tax Court, contradicts the principle of substantive justice, violates the legality principle due to reliance on a repealed article, and leads to legal uncertainty and inefficiency in the tax system. The study concludes that tax administration must consider not only formal legal aspects but also justice, utility, and the protection of taxpayers constitutional rights. Recommendations include the need for regulatory reform, a substantive approach to tax enforcement, and fair and proportional legal interpretation by tax law enforcement authorities.

Keywords: *Input Tax, VAT, Tax Justice, Gustav Radbruch Theory, Adam Smith & Aristotle's Justice.*